



RANKHIR RENJA 2027

DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2027 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Rancangan Akhir Renja ini disusun sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan serta selaras dengan visi Kota Jambi yaitu *"Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera"*, serta mendukung misi *"Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan."*

Dokumen ini memuat program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2027 yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, mewujudkan sistem perhubungan yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan. Selain itu, dokumen ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai isu strategis, antara lain peningkatan manajemen lalu lintas, penataan perparkiran, pengembangan angkutan umum, peningkatan keselamatan transportasi, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem transportasi.

Dalam penyusunannya, Rancangan Akhir Renja ini telah melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan daerah, dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan perencanaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2027 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan di Kota Jambi.

Jambi, April 2026



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI

Drs. AMRAN, ME
Pembina Utama Muda

NNIP. 19691005 198908 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2025)	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2025) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	13
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	51
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	60
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	70
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	71
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	71
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi	72
3.3 Program dan Kegiatan	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	79
BAB V PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

T-C 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Lalu	15
T.C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	33
T.C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027	62
T.C 32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027	70
T.C 33	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Dan Perkiraan Maju Tahun 2028	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Jambi serta mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Renja ini memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di bidang perhubungan selama satu tahun anggaran. Selain itu, Renja juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta sebagai instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah.

Dalam rangka mendukung visi Kota Jambi yaitu *"Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera"*, serta misi *"Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan"*, Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan meningkatnya mobilitas masyarakat, sektor perhubungan menghadapi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, penataan parkir yang belum optimal, serta kebutuhan peningkatan keselamatan transportasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2027 juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian kinerja perangkat daerah, serta permasalahan dan tantangan aktual yang dihadapi di lapangan.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2027, diharapkan tersedia dokumen perencanaan yang menjadi acuan awal dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan yang

responsif terhadap isu strategis perhubungan di Kota Jambi, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah guna mewujudkan pelayanan perhubungan yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan.

Capaian yang ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing perangkat daerah dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027;
- c. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2027.

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Jambi sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, yang meliputi :

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;



- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penetapan Renja Perangkat Daerah sesuai pasal 142 ayat (2) Permendagri No.86 Tahun 2017 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan dan pada pasal 143 ditegaskan bahwa Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Selanjutnya, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dalam Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yaitu :

- 1) Perangkat Daerah menyusun Renja OPD;
- 2) Rancangan Renja OPD disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- 3) Rancangan Renja OPD memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- 4) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjuk prakiran maju.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi dilaksanakan melalui lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu :

- a. Pendekatan politik, yang merupakan penjabaran agenda - agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan Walikota;
- b. Pendekatan teknokratik, yang dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berfikir ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sector dan lintas pelaku;
- c. Pendekatan partisipatif, yang dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan;

- d. Pendekatan Atas-Bawah (top-down), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan antara Kementrian/ Lembaga dengan OPD melalui Forum OPD dan Forum Gabungan OPD;
- e. Pendekatan Bawah-Atas (botton-up), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan antara OPD dengan OPD Kab/Kota melalui Forum OPD dan Forum Gabungan OPD.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja terdapat beberapa metode pelaksanaan yang dilakukan sebagai bagian dari perwujudan pendekatan-pendekatan di atas yaitu :

- 1) Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam :
 - a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - b. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Kota Jambi dan Pemerintah Pusat;
- 2) Digitalisasi system perencanaan meliputi : Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Jambi dan Pemerintah Pusat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (3) bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis *e-planning*.

Renja ini disusun melalui 4 (empat) tahapan, yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, yakni :

- a. Tahap Pertama : Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut :
 - 1) OPD menerima Rancangan Awal RKPD dari Bappeda Kota Jambi
 - 2) OPD membentuk Tim Penyusun Renja OPD
 - 3) Tim Penyusun Renja OPD menyiapkan bahan-bahan penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD dengan memperhatikan :
 - a) Program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra OPD pada tahun rencana;

- b) Rancangan Akhir RKPD;
 - c) Renja K/L untuk penyusunan Renja OPD Provinsi;
 - d) Renja OPD Provinsi untuk penyusunan kegiatan pada Renja OPD kab/Kota
- 4) Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya
- 5) Melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD yang berisi Program dan Kegiatan OPD yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, berdasarkan Rancangan Akhir RKPD, Renstra OPD serta memperhatikan tupoksi OPD dan alokasi anggaran indikatif :
 - a) Bagi Pemerintah Kota, memperhatikan hasil Musrenbang kecamatan dan Rancangan Akhir RKPD;
 - b) Bagi Pemerintah Provinsi, memperhatikan hasil musrenbang Kabupaten dan Kota, rancangan Renja K/L dan Rancangan Akhir RKPD;
 - c) Menyiapkan forum OPD.
- 6) Menyampaikan rancangan Renja OPD kepada Bappeda sebagai bahan informasi pelaksanaan forum OPD.
- b. Tahap Kedua : Penyelenggaraan Forum OPD
- c. Tahap Ketiga : Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD
 - 1) Menyusun rancangan akhir Renja OPD dengan memperhatikan hasil-hasil dari Forum OPD;
 - 2) Kepala OPD menyampaikan rancangan akhir Renja OPD kepada Kepala Bappeda Kota Jambi;
 - 3) Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja OPD;
 - 4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja OPD yang telah verifikasi untuk diajukan kepada kepala Daerah dalam rangka memperoleh pengesahan.
- d. Tahap Keempat : Penetapan Peraturan Kepala OPD tentang Renja OPD

Langkah – langkah dalam tahapan keempat mengenai penetapan peraturan kepala OPD tentang Renja OPD adalah sebagai berikut :

- 1) Menyempurnakan rancangan akhir Renja OPD sesuai hasil verifikasi oleh Bappeda;
- 2) Pengesahan rancangan akhir Renja OPD dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD tahun berkenan ditetapkan;
- 3) Penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD paling lama 14 (empat belas) hari setelah Renja OPD disahkan oleh Kepala Daerah.

Melalui Forum OPD baik Provinsi atau Kab/Kota yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi diharapkan dapat :

- Menyelaraskan Program dan Kegiatan OPD Kota Jambi dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kab/Kota;
- Mempertajam indikator serta target kinerja Program dan Kegiatan OPD Kota Jambi sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- Menyelaraskan Program dan Kegiatan antar OPD Kota Jambi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
- Menyesuaikan pendanaan Program dan Kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD Kota.

Hasil pelaksanaan forum OPD yang telah diselenggarakan dan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi tersebut adalah sebagai berikut :

- Rancangan Akhir Renja OPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran OPD yang disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan dalam forum OPD
- Daftar prioritas program dan kegiatan menurut sumber pendanaan
- Berita acara hasil forum OPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2027 ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, serta peraturan



daerah yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sektor transportasi, di antaranya :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2027 adalah sebagai pedoman perencanaan tahunan yang berfungsi untuk merencanakan dan mengarahkan pelaksanaan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam rangka mendukung pembangunan sektor transportasi yang lebih baik, efisien, aman, dan berkelanjutan di Kota Jambi. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk :

1. Menentukan arah kebijakan transportasi : Agar kebijakan, strategi, dan program yang akan dilaksanakan sejalan dengan visi, misi, serta arah pembangunan transportasi yang lebih terencana dan terarah.
2. Meningkatkan integrasi antar moda transportasi : Untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan efektif, baik dalam hal infrastruktur maupun pelayanan.
3. Menanggapi tantangan kebutuhan transportasi yang berkembang : Menghadapi berbagai tantangan seperti urbanisasi yang cepat, peningkatan jumlah penduduk, serta meningkatnya permintaan akan sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik : Untuk memberikan akses yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat dalam hal angkutan umum dan moda transportasi massal.
5. Mengoptimalkan alokasi sumber daya : Menyusun rencana yang realistis dan sesuai dengan anggaran dan sumber daya yang tersedia agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. **Menetapkan prioritas program dan kegiatan :**

Menyusun program kerja yang mencakup kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki sistem transportasi di Kota Jambi.



Program ini meliputi pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas transportasi publik, serta penerapan teknologi transportasi yang lebih modern.

2. Meningkatkan kualitas dan keamanan sistem transportasi :

Mencapai sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan, serta mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan dampak negatif terhadap lingkungan.

3. Meningkatkan keterhubungan dan integrasi antar moda transportasi :

Mengoptimalkan penggunaan berbagai moda transportasi yang ada, seperti transportasi darat dan air dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik dan saling terintegrasi.

4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan public :

Memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat, terutama dalam hal penggunaan angkutan umum dan transportasi massal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keterjangkauan, dan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

5. Mendorong pengembangan transportasi ramah lingkungan :

Mewujudkan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik, sistem transportasi berbasis teknologi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kendaraan ramah lingkungan.

6. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya :

Memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, termasuk SDM dan infrastruktur.

7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM sektor perhubungan :

Menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja di sektor transportasi untuk mendukung kelancaran operasional sistem transportasi yang lebih modern dan aman.



8. Melakukan evaluasi dan monitoring :

Menyusun mekanisme evaluasi dan monitoring untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, serta dapat disesuaikan jika diperlukan demi mencapai hasil yang optimal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berisikan tentang usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor– faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2025)

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi pada umumnya telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD serta RKPD Tahun 2025. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai tingkat capaian kinerja program dan kegiatan, efektivitas pelaksanaan, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi menunjukkan hasil yang sangat baik meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan perbaikan pada perencanaan tahun berikutnya.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa :

- Sebagian besar indikator kinerja program telah mencapai target yang ditetapkan.
- Beberapa kegiatan belum mencapai target optimal akibat, penyesuaian kebijakan, serta kendala teknis di lapangan.
- Realisasi anggaran secara umum berada pada kategori efisien, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 86,17%

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-0/2025) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2025). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan

realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dalam Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, beberapa hal yang akan di evaluasi adalah :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu :

- sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Target kinerja capaian semestinya 100%, namun tidak terealisasi dikarena belanja insentif pemungut retribusi tidak memenuhi target PAD sehingga tidak terealisasi sepenuhnya.

2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu hampir keseluruhan capaian kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan tahun 2025 tercapai sesuai target.

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu capaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan tidak ada yang melebihi target.

4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2025 secara fisik terealisasi 100%.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya inflasi.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/ kegiatan/ sub kegiatan adalah akan dilaksanakan Evaluasi dan penyesuaian dalam rencana kegiatan tahun berikutnya dengan inflasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai dan dapat terealisasi.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi sampai dengan Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL T-C 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU
KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2026	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	300%
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ Bulan	300 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	100%	80 Orang/ Bulan	455 Orang/ Bulan	152%
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	100 Dokumen	300 Dokumen	300%
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9 Paket	300%
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	30 Orang	300%



KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2026	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	300%
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	300%
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	CAKUPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	12 Unit	300%
2.15.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%



KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2026	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	CAKUPAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN BARANG	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65 Unit	65 Unit	65 Unit	65 Unit	100%	65 Unit	195 Unit	300%
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	30 Unit	300%
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	15 Unit	300%
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PENURUNAN V/C RATIO JARINGAN JALAN	0,46	0,428	0,48	0,48	100%	0,47	138%	300%
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pengendalian Jaringan LLAJ	75,00%	75,00%	0,00%	0,00%	100%	75,00%	150%	200%
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	100%	100%	86%	86%	100%	93%	279%	279%
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	11423 Unit	11423 Unit	11455 Unit	11455 Unit	100%	11413 Unit	34291 Unit	300%
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	68464 Unit	68464 Unit	46018 Unit	46018 Unit	100%	57251 unit	171733 Unit	251%
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Indeks Kepuasan Layanan Terminal	100%	-	100%	100%	100%	100%	200%	200%
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2 Unit	2 Unit	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.03.06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	6 Unit	300%
2.15.02.2.03.10	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	5 Orang	-	-	-	-	-	100%



KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2026	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Penataan Perparkiran	100%	100%	87%	87%	100%	93%	280%	280%
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kab/Kota dalam Sistem	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	750 Dokumen	750 Dokumen	650 Dokumen	650 Dokumen	100%	700 Dokumen	2150 Dokumen	287%
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Laporan	48 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	36 Laporan	84 Laporan	175%
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Layak Uji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	3 Orang	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	40.000 Dokumen	120.000 Dokumen	40.000 Dokumen	40.000 Dokumen	100%	40.000 Dokumen	120.000 Dokumen	300%
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	15 Unit	300%
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5600 Unit	5600 Unit	5600 Unit	5600 Unit	100%	5600 Unit	16800 Unit	300%
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	28 Laporan	233%
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	300%
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	300%



KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2026	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	3 Orang	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	40 Laporan	120 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	100%	40 Laporan	120 Laporan	300%
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	100%	100%	40%	40%	100%	70%	210%	210%
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	110 Unit	110 Unit	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	-	100%



KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2026	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	30%	30%	10%	10%	100%	20%	60%	200%
2.15.02.2.10.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Persentase Kesesuaian Indikator Rencana Induk	30%	30%	10%	10%	100%	20%	60%	200%
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100%



KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2026	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	RASIO LAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	71%	71%	45%	45%	100%	64%	180%	254%
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	100%	71%	71%	100%	85%	256%	256%
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	100%
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	300%



a. Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 23.192.934.000,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 22.975.606.522,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 217.327.478,00. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp. 21.168.038.000,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 19.911.447.249,00 dan belanja modal sebesar Rp. 1.256.590.751,00 terealisasi sebesar Rp. 18.239.486.939,00 atau 86,17% yang terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 19.911.447.249,00	Rp.16.987.784.239,00	(85,32)
Belanja Modal	Rp. 1.256.590.751,00	Rp. 1.251.702.700,00	(99,61)
Total Anggaran	<u>Rp. 21.168.038.000,00</u>	<u>Rp.18.239.486.939,00</u>	(86,17)

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Jambi secara keseluruhan program dan kegiatan sudah dilaksanakan secara fisik 100% dan keuangan 86,17% atau terjadi silpa sebesar Rp. 2.928.551.061,00,- Anggaran silpa di sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dikarenakan Target pemungutan retribusi PAD tidak sepenuhnya tercapai sehingga Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi tidak terealisasi sepenuhnya.

Anggaran	Realisasi	Fisik	Keuangan	Silpa
21.168.038.000,00	18.239.486.939,00	100%	86,17%	2.928.551.061,00

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA), dan pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) program non urusan dan 2 (dua) program yang dibiayai dan menjadi urusan wajib Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam mewujudkan Tujuan Perangkat Daerah : "**Peningkatan Kualitas Layanan Perhubungan**"



b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

Tercapainya atau tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian target kinerja bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diharapkan antara lain adalah faktor eksternal, internal, dan faktor teknis terkait pelaksanaan program. Berikut adalah beberapa faktor penyebab tersebut :

1. Perubahan Kebijakan Pemerintah

- Kebijakan yang Tidak Sesuai dengan Renja :

Perubahan kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional dapat mempengaruhi program yang sudah direncanakan. Misalnya, adanya perubahan kebijakan fiskal yang mempengaruhi alokasi dana daerah, atau adanya kebijakan baru yang mengubah prioritas pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renja.

2. Kondisi Ekonomi Makro

- Inflasi dan Kenaikan Harga :

Kenaikan harga bahan bakar, bahan bangunan, atau barang lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dapat meningkatkan biaya pelaksanaan program, mengurangi kapasitas untuk menyelesaikan kegiatan, atau bahkan menyebabkan keterlambatan.

- Penurunan Pendapatan Daerah :

Penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak terduga akibat faktor eksternal seperti pandemi atau krisis ekonomi global dapat membatasi alokasi dana untuk program-program transportasi dan infrastruktur.

3. Kondisi Sosial dan Demografi

- Urbanisasi yang Cepat :

Peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi yang cepat dapat mempengaruhi volume penggunaan transportasi umum dan mempercepat kerusakan infrastruktur, yang memerlukan lebih banyak anggaran untuk pemeliharaan.

- Perubahan Pola Perilaku Masyarakat :

Masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya penggunaan angkutan umum atau pola transportasi yang ramah lingkungan dapat mengurangi efektivitas program peningkatan kualitas transportasi publik atau kampanye keselamatan berlalu lintas.

4. Kendala dalam Pengadaan Barang dan Jasa

- Proses Pengadaan yang Lama :

Proses pengadaan barang dan jasa yang rumit dan memakan waktu panjang sering kali menjadi penyebab keterlambatan dalam pelaksanaan program. Hal ini dapat menghambat penyediaan material atau peralatan yang dibutuhkan dalam waktu yang tepat.

5. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung

- Pengembangan sistem informasi transportasi atau penggunaan kendaraan listrik yang lebih efisien membutuhkan infrastruktur pendukung yang cukup, seperti stasiun pengisian baterai kendaraan listrik atau sistem pemantauan lalu lintas yang canggih, yang memerlukan biaya dan waktu.

6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Keterampilan dan Kompetensi :

Jika tenaga kerja yang terlibat dalam program atau kegiatan tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang memadai, maka pelaksanaan kegiatan bisa terhambat. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik program dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pelaksanaan.

7. Pengelolaan Anggaran dan Pendanaan

- Keterbatasan Anggaran :

Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan. Anggaran yang kurang dari yang direncanakan dapat menghambat pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan armada angkutan umum.

- Efisiensi Penggunaan Anggaran :

Dalam beberapa kasus, meskipun anggaran sudah tersedia, tetapi kurangnya pengelolaan yang efisien bisa menyebabkan penggunaan dana tidak optimal, sehingga mempengaruhi hasil yang diharapkan.

8. Koordinasi dan Sinergi Antar Bagian

- Kurangnya Koordinasi : Ketidakselarasan antara berbagai bagian di Dinas Perhubungan maupun dengan instansi terkait lainnya bisa menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan. Misalnya, kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dengan bagian pelaksanaan atau antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam hal pengembangan infrastruktur.

c. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

Beberapa faktor yang menyebabkan target kinerja dapat tercapai atau bahkan melebihi target antara lain :

- Perencanaan yang matang : Program yang disusun dengan perencanaan yang lebih terperinci dan realistis, berdasarkan data yang akurat dan kebutuhan lapangan, cenderung dapat mencapai atau melampaui target.
- Ketersediaan anggaran yang memadai : Dana yang cukup untuk melaksanakan program atau kegiatan sangat berpengaruh dalam



pencapaian target. Ketika anggaran tercapai sesuai dengan kebutuhan, program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

- Koordinasi yang baik antar instansi : Sinergi antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Polisi Lalu Lintas, dan pihak swasta, memudahkan implementasi program.
- Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta : Partisipasi aktif masyarakat dalam program keselamatan lalu lintas atau dalam menggunakan transportasi publik dapat meningkatkan efektivitas program dan memungkinkan melebihi target yang ditetapkan.

d. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2026

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2026 pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Jambi yaitu Rp. 24.668.591.000,00,- terurai dalam 3 (tiga) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Subkegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja bisa melebihi tahun 2025 atau minimal sama, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan
2. Masih kurangnya sumber daya manusia dibidang perhubungan baik yang menangani administrasi maupun teknis
3. Keterbatasan anggaran Kota Jambi

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam pelaksanaan urusan perhubungan tersebut, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun

2025-2029 maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki sarana dan prasarana;
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur perhubungan;
3. Meningkatkan integritas dan etos kerja aparatur;
4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur;
5. Menyusun perencanaan pembangunan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat;
6. Meningkatkan sinkronisasi pembangunan daerah dengan OPD-OPD yang berkaitan;
7. Memperbaiki kualitas dan kuantitas data dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan sektor perhubungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, untuk tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Jambi telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan sektor perhubungan di Kota Jambi terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perhubungan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Meningkatnya mutu pelayanan di bidang perhubungan.
3. Meningkatnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik sesama pemerintah maupun swasta.
4. Tertibnya pelaksanaan administrasi dilingkungan Dinas Perhubungan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Jambi meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;



2. Pemenuhan peralatan yang mendukung tugas aparat perhubungan;
3. Penguatan koordinasi intern lingkungan Dinas Perhubungan Kota Jambi;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-hari.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Konektivitas Kab/Kota	0,07	$K = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$ $= (0,11 \times 70) + (0 \times 0)$ $= 0,07 + 0$ $= 0,07$ $KTD = \frac{\text{Jumlah Trayek yang Terlayani}}{\text{Jumlah Trayek yang Ditetapkan}}$ $= \frac{2}{19}$ $= 0,11$ Bobot WTD 70% $0,11 \times 70 = 0,07$
2.	Volume/ Capacity Ratio di Jalan Kab/Kota	0,567	V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. V/C Ratio di Jalan Kab/Kota Jambi = 0,567 (Tingkat Pelayanan C)
3.	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	0	IKK belum tercapai karena belum terdapat Perusahaan Angkutan Umum di Kota Jambi yang tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) serta kewenangan sertifikasi berada pada pemerintah pusat, sehingga data dinyatakan nihil.

TABEL T.C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI

NO.	INDIKATOR (IKU)	ANGKA/ NILAI TARGET/ STANDAR (IKU)	TARGET RENSTRA PD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI 2025	CATATAN ANALISIS
			2024	2025	2026	2023	2024		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	2022-2023								
1.	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan		0,48	0,47	0,46	0,440	0,435	0,428	
2.	Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau		45%	64%	71%	75%	77%	79%	

Seluruh kegiatan dalam program direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai sasaran kinerja. Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kinerja yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2024 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance plan*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan 4 (empat) kategori seperti tabel sebagai berikut :

Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	90% - 100%	Sangat Baik
2	80% - 89%	Baik
3	50% - 79%	Cukup Baik
4	< 49%	Kurang

Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Kinerja Anggaran	21.168.038.000,00	18.239.486.939,00	86,17
2	Kinerja Pendapatan Dinas	7.960.000.000,00	2.567.639.800	32,26

2.2.2 Landasan Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Perhubungan Kota Jambi didasarkan pada beberapa landasan hukum yang berlaku di Indonesia, yang melibatkan regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam pengelolaan transportasi dan infrastruktur di tingkat kota, sehingga pembentukannya tidak terlepas dari aturan yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah dan penyelenggaraan perhubungan.

Berikut adalah landasan hukum utama dalam pembentukan Dinas Perhubungan Kota Jambi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi menjadi dasar hukum yang mengatur pembentukan Dinas Perhubungan Kota Jambi dan memberikan kewenangan kepada dinas tersebut untuk mengelola urusan perhubungan di kota.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan pembangunan dibidang perhubungan yang meliputi :

1. Bidang Lalu Lintas,
2. Bidang Angkutan dan Sarana,
3. Bidang Prasarana,
4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan,



5. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor,
6. UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan.
7. Sekretariat

Untuk melaksanakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
- c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Perhubungan Yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi, ada beberapa kewenangan yang dapat di limpahkan antara lain :

1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan penggunaan jalan;
2. Rekomendasi terkait dengan manajemen, pengawasan dan rekayasa lalu lintas di wilayah kecamatan;
3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek angkutan umum, terminal dll.

2.2.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Perhubungan Kota Jambi

2.2.4.1 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II-b) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

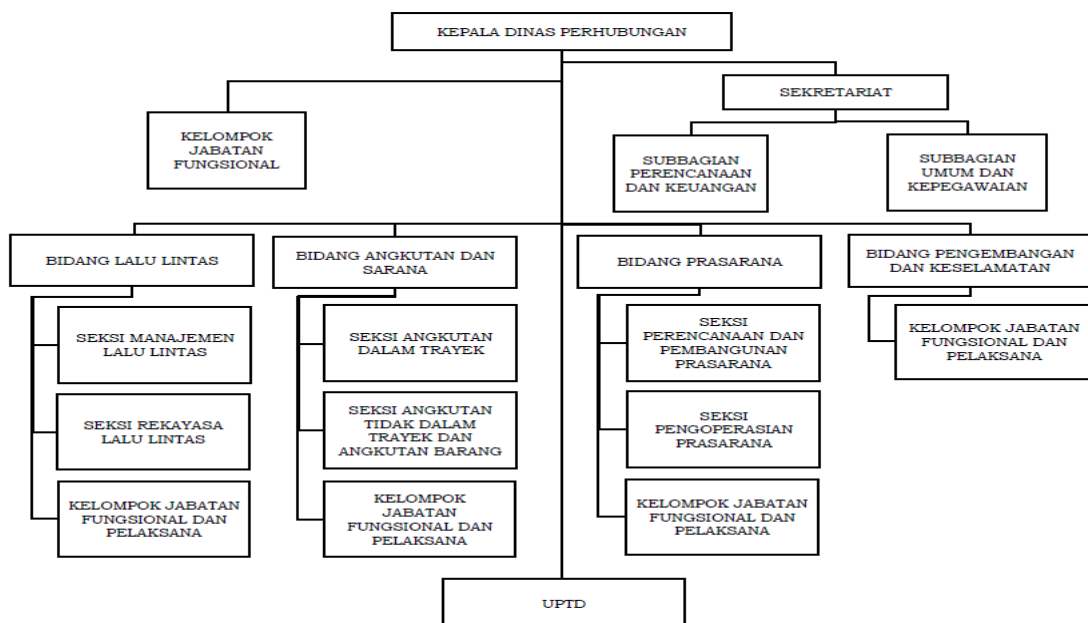
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut :



1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. Bidang Lalu Lintas, yang membawahi Seksi Manajemen Lalu Lintas, Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
4. Bidang Angkutan dan Sarana, yang membawahi Seksi Angkutan Dalam Trayek, Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
5. Bidang Prasarana, yang membawahi Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, Seksi Pengoperasian Prasarana, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 50 TAHUN 2025
TANGGAL 30 DESEMBER 2025



Gambar 1 Struktur Organisasi



2.2.4.2 Tata Laksana

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perhubungan dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Perhubungan Kota;
- b. Pemberian Dukungan Administrasi yang meliputi Kepegawaian, Ketatausahaan, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Dokumentasi;
- c. Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Daerah; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat memiliki dua Sub Bagian, yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, keuangan, evaluasi, dan pelaporan Dinas serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tanggan dan perlengkapan pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja ASN serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Lalu Lintas,

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Lalu Lintas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas memiliki 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas,

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota;
- b. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kota yang terletak pada jaringan jalan kota atau jaringan jalur kereta api kota; dan
- c. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas,

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumus pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota;
- b. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota; dan
- c. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



4. Bidang Angkutan dan Sarana,

Bidang Angkutan Dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan sarana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Angkutan Dan Sarana mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan dan Sarana memiliki 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Angkutan Dalam Trayek,

Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah kota;
- b. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kota;
- c. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kota;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam 1(satu) Daerah kota, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kota;
- e. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kota,

- f. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kota;
 - g. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kota yang bersangkutan,
 - h. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kota, dan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kota; dan
 - i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
- Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek Dan Angkutan Barang mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum urituk jasa angkutan barang dalam Daerah kota;
 - b. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kota;
 - c. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kota;
 - d. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan Sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
 - e. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Prasarana;

Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Perencanaan, Pembangunan, Dan Pengoperasian Prasarana;
- b. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian Dan Perawatan Prasarana;
- c. Penyiapan Bahan Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perencanaan, Pembangunan, Dan Pengoperasian Dan Perawatan Prasarana; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana memiliki 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana,

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan lokal;
- b. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penertipan izin penyelenggaraan dan Pembangunan penerbitan izin Pelabuhan pengumpan lokal; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengoperasian Prasarana,

Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin



penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kota.

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pengumpul lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin usaha, izin Pembangunan;

c. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. UPTD;

a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala UPTD pengujian kendaraan bermotor melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
2. melaksanakan pembinaan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
3. melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
4. melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
5. melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan pengujian kendaraan bermotor;
6. melaksanakan pendataan, pengadministrasian pendaftaran kendaraan pengujian;
7. melakukan analisa ketaatan wajib uji;
8. melakukan pengujian kendaraan bermotor di luar gedung uji;
9. mengukur kebutuhan, menyediakan perlengkapan lulus uji;
10. melaksanakan pengukuran dan pemeliharaan peralatan uji termasuk kalibrasi sehingga keakuratan alat uji tetap terjaga;
11. menyusun sistem informasi manajemen penguji kendaraan bermotor;
12. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan

Kepala UPTD pengelola prasarana perhubungan melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang pengelola prasarana perhubungan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
2. melaksanakan perencanaan kebutuhan UPTD;
3. melaksanakan pelayanan, pengelolaan dan pengaturan terminal, pendapatan retribusi terminal;
4. melaksanakan pembangunan fasilitas terminal;
5. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana;
6. melaksanakan pencatatan keluar masuk kendaraan di terminal;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
8. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

2.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kota Jambi memiliki sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya infrastruktur serta sumber daya teknologi yang mendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memastikan kelancaran transportasi, keselamatan berlalu lintas dan pembangunan infrastruktur perhubungan di Kota Jambi. Berikut adalah rincian Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dari sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah faktor utama dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. SDM di Dinas Perhubungan Kota



Jambi terdiri dari pegawai yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan keahlian di berbagai bidang perhubungan, baik itu transportasi darat, laut, udara, maupun pengelolaan infrastruktur perhubungan.

Tupoksi SDM Dinas Perhubungan Kota Jambi :

- Perencanaan dan Pengembangan SDM :
 - Menyusun dan melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai di bidang transportasi, keselamatan lalu lintas, dan pengelolaan infrastruktur.
 - Meningkatkan kompetensi teknis bagi pegawai terkait dengan pengelolaan transportasi publik, pengawasan lalu lintas, serta pemeliharaan infrastruktur jalan.
- Pelaksanaan Pendidikan dan Sosialisasi :
 - Menyelenggarakan kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait dengan keselamatan lalu lintas, peraturan transportasi, dan pengelolaan angkutan umum.
 - Membina dan mendidik masyarakat serta pengemudi kendaraan melalui kampanye keselamatan dan pelatihan pengemudi.
- Penempatan dan Pengelolaan Pegawai :
 - Melakukan penempatan pegawai pada posisi dan bidang yang tepat berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, guna mendukung kinerja Dinas Perhubungan yang lebih efektif.
 - Mengelola karier pegawai melalui pembinaan dan promosi jabatan yang sesuai dengan kinerja dan prestasi.
- Penyusunan dan Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) :
 - Membuat SOP yang mengatur tentang penanganan kecelakaan, pemeliharaan fasilitas transportasi serta pengelolaan angkutan umum dan lalu lintas.

2. Sumber Daya Keuangan (Anggaran)

Sumber daya keuangan merupakan elemen penting untuk mendanai seluruh kegiatan operasional dan pembangunan infrastruktur di Dinas



Perhubungan Kota Jambi. Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan proyek, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, pengadaan armada angkutan, serta peningkatan pelayanan publik. Tupoksi Sumber Daya Keuangan Dinas Perhubungan Kota Jambi :

- Perencanaan Anggaran :
 - Menyusun dan merencanakan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, pembangunan infrastruktur, dan pemeliharaan sarana transportasi.
 - Menyusun anggaran berdasarkan prioritas kegiatan dan kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Perhubungan.
- Pengelolaan dan Pengawasan Penggunaan Anggaran :
 - Mengelola anggaran yang ada dengan transparan dan efisien memastikan dana yang dialokasikan tepat sasaran.
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran secara berkala untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau pemborosan dana.
- Pembiayaan Infrastruktur Perhubungan :
 - Menyusun anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi seperti jalan, terminal, dan fasilitas angkutan umum lainnya.
 - Memfasilitasi pembiayaan alternatif seperti kerjasama dengan pihak swasta atau mencari pendanaan luar negeri untuk proyek infrastruktur besar.
- Pelaporan Keuangan :
 - Menyusun laporan keuangan secara berkala, baik untuk laporan internal maupun untuk audit oleh lembaga yang berwenang.
 - Menyediakan transparansi keuangan dalam hal penggunaan dana untuk kegiatan atau program yang didanai.

3. Sumber Daya Infrastruktur

Infrastruktur transportasi adalah sumber daya yang sangat vital bagi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam mendukung kelancaran sistem transportasi di kota.



Infrastruktur yang dikelola termasuk jalan raya, terminal, halte, dan fasilitas angkutan lainnya.

Tupoksi Sumber Daya Infrastruktur Dinas Perhubungan Kota Jambi :

- Pembangunan Infrastruktur Transportasi :
 - Merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur transportasi yang mendukung kelancaran lalu lintas, termasuk jalan raya, jembatan, dan terminal angkutan umum.
 - Mengembangkan fasilitas transportasi ramah lingkungan seperti jalur sepeda dan terminal yang mendukung kendaraan listrik.
- Pemeliharaan dan Renovasi Infrastruktur :
 - Melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur jalan seperti perbaikan jalan berlubang, pembuatan rambu lalu lintas, serta pengecatan marka jalan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas.
 - Mengidentifikasi infrastruktur yang sudah rusak atau tidak memadai dan merencanakan renovasi atau pembangunan ulang.
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Fasilitas Transportasi :
 - Mengelola terminal angkutan umum seperti terminal angkutan orang dan angkutan barang untuk memastikan fasilitas tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara efisien dan aman.
 - Mengelola fasilitas halte, pemberhentian angkutan umum dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung transportasi publik.

4. Sumber Daya Teknologi (IT)

Teknologi informasi (TI) adalah sumber daya penting yang semakin mendukung kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam pengelolaan transportasi dan lalu lintas, serta memastikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Teknologi digunakan untuk memonitor dan mengatur transportasi secara real-time.

Tupoksi Sumber Daya Teknologi Dinas Perhubungan Kota Jambi :

- Pengembangan Sistem Informasi Lalu Lintas :
 - Mengembangkan sistem pengaturan lalu lintas berbasis teknologi untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas di Kota Jambi seperti



penggunaan lampu lalu lintas otomatis atau sistem manajemen jalan berbasis IT.

- Menerapkan sistem monitoring angkutan umum dan pelacakan kendaraan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait transportasi publik.
- Sistem Informasi Transportasi Publik :
 - Mengembangkan dan memperkenalkan aplikasi berbasis smartphone yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi transportasi publik, seperti jadwal angkutan kota atau tarif angkutan.
 - Meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi proses pendaftaran kendaraan, perizinan, dan pelayanan publik lainnya.
- Keamanan Lalu Lintas Berbasis Teknologi :
 - Memasang kamera CCTV di lokasi-lokasi strategis untuk memantau situasi lalu lintas dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis.
 - Meningkatkan penggunaan sistem informasi geografis (GIS) untuk perencanaan dan pengawasan infrastruktur transportasi, termasuk identifikasi titik rawan kecelakaan.
- E-Government dan E-Services :
 - Menyediakan layanan online untuk pengurusan izin, pelaporan pelanggaran lalu lintas, dan informasi transportasi lainnya.
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik melalui sistem *e-government* yang memungkinkan masyarakat mengakses data dan informasi secara digital.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perhubungan Kota Jambi menghadapi berbagai isu penting yang perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan transportasi kota. Beberapa isu penting tersebut mencakup tantangan di bidang infrastruktur, regulasi, anggaran, teknologi, serta pengelolaan sumber daya manusia. Berikut

adalah beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyelenggaraan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Jambi :

1. Kemacetan Lalu Lintas
2. Keselamatan Lalu Lintas
3. Pengembangan Infrastruktur Transportasi yang Tertinggal
4. Keterbatasan Transportasi Umum
5. Transportasi Ramah Lingkungan
6. Pelayanan Pengelolaan Perpustakaan
7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Efektif

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam Rencana Kerja (Renja) 2026, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Beberapa di antaranya melibatkan aspek kelembagaan, anggaran, infrastruktur, koordinasi dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

1. Keterbatasan Anggaran

- **Anggaran yang Tidak Memadai** : Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang diharapkan dalam Renja 2026. Tugas Dinas Perhubungan seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pengadaan sarana dan prasarana, serta program keselamatan dan pelayanan publik, memerlukan dana yang cukup besar. Jika anggaran terbatas, banyak program prioritas mungkin tidak dapat terealisasi.
- **Ketergantungan pada APBD** : Banyak dana untuk program perhubungan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sering kali terbatas dan tidak selalu mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan yang optimal.

2. Infrastruktur Perhubungan yang Belum Memadai

- **Keterbatasan Infrastruktur Transportasi** : Meskipun Kota Jambi berkembang, infrastruktur transportasi, baik untuk jalan, jembatan, terminal,



hingga fasilitas transportasi publik, masih terbatas. Hal ini akan menghambat pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, terutama dalam upaya meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan lalu lintas.

- **Kualitas Jalan dan Ruas yang Tidak Memadai** : Kondisi jalan yang buruk atau tidak terawat dapat memperburuk arus lalu lintas dan menurunkan keselamatan pengguna jalan. Jalan yang rusak atau tidak sesuai standar dapat menghambat kelancaran distribusi barang dan pelayanan transportasi publik.

3. Pengelolaan Transportasi Publik

- **Kurangnya Angkutan Umum yang Terintegrasi** : Salah satu masalah besar dalam sektor perhubungan adalah pengelolaan angkutan umum yang tidak terintegrasi dengan baik. Kurangnya angkutan umum yang tepat waktu, terjangkau, dan efisien bisa membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, yang justru menambah kemacetan dan polusi.
- **Kualitas dan Ketersediaan Armada Angkutan Umum** : Kualitas armada angkutan umum yang buruk, seperti angkutan kota (angkot), sering menjadi keluhan masyarakat. Keterbatasan armada dan kondisi kendaraan yang tidak layak dapat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi umum.

4. Kemacetan Lalu Lintas

- **Pertumbuhan Kendaraan yang Cepat** : Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, menyebabkan kemacetan lalu lintas di berbagai titik di Kota Jambi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Dishub dalam mengatur arus lalu lintas dan memberikan solusi jangka panjang yang efektif untuk mengurangi kemacetan.
- **Kurangnya Sistem Manajemen Lalu Lintas yang Efektif** : Sistem pengelolaan lalu lintas yang masih tradisional dan tidak terintegrasi dengan teknologi modern dapat memperburuk masalah kemacetan. Belum adanya sistem pengendalian lalu lintas yang canggih, seperti smart traffic management, menjadi kendala besar.



5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Kualifikasi dan Kapasitas SDM** : Dinas Perhubungan sering kali menghadapi keterbatasan SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan transportasi modern. Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM perlu terus ditingkatkan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
- **Distribusi SDM yang Tidak Merata** : Kekurangan tenaga kerja yang tersebar di seluruh bidang yang ada di Dinas Perhubungan, seperti pengawasan lalu lintas, pengelolaan angkutan umum, hingga pengaturan parkir, dapat menyebabkan kinerja yang tidak optimal.

6. Masalah Koordinasi Antar Instansi

- **Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Lain** : Banyak masalah dalam sektor perhubungan yang melibatkan berbagai instansi lain, seperti kepolisian, dinas Pekerjaan Umum (PU), serta instansi terkait lainnya. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi ini dapat menghambat implementasi kebijakan perhubungan yang terpadu dan efektif.
- **Tumpang Tindih Kewenangan** : Beberapa tugas atau kewenangan yang tumpang tindih antara Dinas Perhubungan dengan instansi lain (misalnya, pengelolaan parkir atau pengawasan lalu lintas) dapat menghambat pelaksanaan tugas secara optimal.

7. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan

- **Kebijakan yang Tidak Tepat Sasaran** : Beberapa kebijakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan mungkin tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Misalnya, kebijakan yang terlalu fokus pada aspek teknis tanpa mempertimbangkan faktor sosial atau ekonomi masyarakat dapat mengurangi efektivitasnya.
- **Perubahan Regulasi yang Mendadak** : Perubahan kebijakan atau regulasi yang mendadak terkait transportasi atau angkutan umum dari tingkat pusat atau provinsi dapat membingungkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi.



8. Tantangan dalam Pengelolaan Sistem Transportasi Berkelanjutan

- **Kurangnya Infrastruktur Transportasi Ramah Lingkungan** : Kota Jambi perlu beralih ke sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti transportasi berbasis energi terbarukan. Namun, pengembangan infrastruktur untuk mendukung sistem ini, seperti jalur sepeda, transportasi publik berbasis listrik, dan stasiun pengisian daya, membutuhkan dana besar dan perencanaan yang matang.
- **Kurangnya Kesadaran Masyarakat** : Pendidikan masyarakat tentang pentingnya penggunaan transportasi yang ramah lingkungan masih terbatas. Ini dapat menghambat upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengalihkan masyarakat ke angkutan umum yang lebih ramah lingkungan.

9. Faktor Eksternal

- **Bencana Alam atau Cuaca Ekstrem** : Kota Jambi, seperti banyak daerah lainnya, dapat menghadapi tantangan terkait bencana alam atau cuaca ekstrem, seperti banjir, yang dapat merusak infrastruktur transportasi dan mengganggu sistem transportasi yang ada.
- **Pertumbuhan Penduduk yang Cepat** : Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat di Kota Jambi dapat memperburuk masalah transportasi dan mobilitas. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap sarana transportasi publik dan infrastruktur jalan.

10. Manajemen Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas

- **Tingginya Angka Kecelakaan** : Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di Kota Jambi dapat menjadi masalah besar bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terkait keselamatan jalan.
- **Kurangnya Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum** : Sistem pengawasan lalu lintas yang kurang optimal dan penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pelanggaran dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan mengurangi keselamatan pengguna jalan.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, Dinas Perhubungan Kota Jambi perlu fokus pada beberapa langkah strategis, seperti :

1. Peningkatan anggaran dan prioritas sektor transportasi dalam APBD.
2. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait untuk pengelolaan transportasi yang lebih efisien.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan.
4. Pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. Implementasi sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi modern (smart traffic management).
6. Penegakan hukum yang lebih tegas terkait keselamatan lalu lintas dan pengawasan angkutan umum.

Dengan langkah-langkah ini, Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renja 2027.

Disamping dinas teknis yang disertai tugas menyelenggarakan urusan wajib di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Jambi juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi parkir, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang untuk itu dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang dalam bentuk tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta permasalahan di bidang perhubungan, yang kemudian dituangkan sebagai kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Kota Jambi.

2.3.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan pada jam – jam tertentu. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet (*level macro = tata ruang, level mezzo = transport demand, dan level micro = street level*),



serta dinamika Kota Jambi semakin berkembang sehingga tidak terlepas dari lonjakan pertumbuhan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas serta melakukan upaya yang intensif dalam hal pengawasan dan penertiban lalu lintas serta pembinaan kepada masyarakat. Selain itu perlu adanya pengembangan dan inovasi dalam upaya pembinaan dan pengawasan lalu lintas, seperti pemanfaatan perkembangan teknologi.
3. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap juru parkir, pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya penertiban perparkiran.
4. Pesatnya perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan dan lainnya serta semakin berkurangnya angkutan umum sehingga perlu adanya kajian dalam hal penataan kembali trayek serta mencari pola/ jenis angkutan umum yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran (tepat waktu) sehingga dapat menarik bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.
5. Semakin meningkatnya teknologi yang diterapkan pada sistem transportasi sehingga perlu adanya penyesuaian dan peningkatan pendidikan aparatur Dinas Perhubungan sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada.

2.3.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian visi dan misi. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :



- a. Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Adanya kerjasama yang baik/ dukungan instansi terkait;
- c. Berkembangnya teknologi dan media informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah dan nasional;
- d. Perubahan Paradigma Kewenangan Terkait Perubahan Perundangan (Undang-undang No.14 Tahun 1992 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah dilakukan perubahan pada bulan Juni 2009 menjadi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ).

Dengan adanya perubahan substansi undang-undang tersebut sangat berpengaruh terhadap koridor penanganan dan penyelenggaraan LLAJ di daerah khususnya adanya perubahan paradigma yaitu sebagai berikut :

**Perbandingan Paradigma Ketugasan
Dinas Perhubungan berdasarkan Perundangan**

No	UU LAMA (No. 14 Tahun 1992)	UU BARU (No.22 Tahun 2009)
1	Lebih Banyak Penanganan Lapangan	Lebih Banyak melakukan Manajemen Transportasi
2.	Bertanggungjawab terhadap operasional dan manajemen	Difokuskan terhadap Manajemen dan Penyusunan Kebijakan
3.		Perumusan Manajemen Kebijakan Lalu Lintas
4.		Penyusunan Rencana Induk Transportasi
5.		Penataan dan Manajemen Perpustakaan
6.		Penyediaan Prasarana LLAJ
7.		Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Transportasi

Berdasarkan perbandingan paradigma pada tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa paradigma Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggungjawabnya dalam melakukan perumusan kebijakan dan kegiatan manajemen lalu lintas serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan prasarana LLAJ di wilayah.

Adapun kewenangan yang telah dibagi antara Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :



**Pembagian Kewenangan Kepolisian RI dan
Perhubungan Sesuai UU No. 22 Tahun 2009**

POLRI bertanggungjawab terhadap Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :	PEMERINTAH bertanggungjawab terhadap Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
Program Nasional Keamanan	Program Nasional Kegiatan Keselamatan
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan	Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan jalan
Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan	Pengkajian Masalah Keselamatan
Pengkajian masalah keamanan	Manajemen Keselamatan LLAJ
Manajemen Keamanan	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan prasarana keselamatan
Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan/atau patroli	
Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi	
Penegakkan hukum	

2.3.3 Permasalahan di Bidang Perhubungan.

Adapun permasalahan Dinas Perhubungan Kota Jambi secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait Bidang Perhubungan, sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem perkotaan sesuai hirarkhi rencana tata ruang masih belum optimal.
2. Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai sampan bermotor sebagai salah satu angkutan umum sungai dalam wilayah Kota Jambi.
3. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutakhiran data-data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan transportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal - TATRALOK).
4. Berkembangnya usaha jasa dan kegiatan ekonomi yang begitu pesat, perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi.
5. Jumlah angkutan umum di Kota Jambi semakin berkurang, hal tersebut disebabkan berkurangnya peminat/ pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perlu adanya

kajian yang mendalam untuk mencari solusi angkutan perkotaan serta peningkatan partisipasi/ peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi.

6. Kondisi jalan bangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kondisi dan jenis kendaraan saat ini (kendaraan bertonase besar) sehingga pengujian harus dilakukan secara manual yang tentunya berpengaruh pada keakuratan pengujian, sehingga perlu adanya solusi dan inovasi sebagai upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/ pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.
8. Masih kurangnya personil dan tenaga SDM yang mempunyai keahlian khusus bidang pengelolaan perparkiran, terminal, MRLL, evaluasi andalalin dan perlengkapan jalan.
9. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas.
10. Terbatasnya anggaran yang menjadi pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Jambi menyebabkan kurang optimalnya dalam mengalokasikan untuk kegiatan rutin, operasional dan fisik (sarana prasarana) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dari faktor – faktor tersebut diatas, dituangkan ke dalam analisa **S.W.O.T** (Strengths -Weakness-Opportunities-Threats) **Matrix** sebagai berikut :

SWOT MATRIX	STRENGTHS (S) :	WEAKNESS (W) :
	1. Tujuan dan Sasaran Dinas yang jelas 2. Sarana dan Prasarana kerja cukup memadai 3. Struktur Organisasi dan Tupoksi 4. SOP, acuan pelaksanaan tugas	1. Belum Optimalnya Kapasitas SDM 2. Bahan Kebijakan Teknis terbatas 3. Alokasi Anggaran terbatas 4. Sarana Prasarana transportasi kurang optimal

OPPORTUNITY (O) :	S - O	W - O
1. UU No. 32 Tahun 2004 2. Potensi Retribusi yang belum tergal 3. Dukungan Instansi terkait 4. Berkembangnya Teknologi 5. Perubahan Paradigma Kewenangan (UU No. 22 Tahun 2009)	1. Implementasikan tujuan dan sasaran kebidang, UPTD 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi PAD 3. Berdayakan sarana prasarana kerja yang ada 4. Berdayakan kode etik pegawai, SOP yang ada 5. Berdayakan UU/ Kewenangan yang ada	1. Lakukan pengembangan SDM 2. Usulkan penambahan pegawai 3. Mengoptimalkan sarana prasarana lalu lintas/ transportasi 4. Meningkatkan ketersediaan data 5. Usulkan rasionalisasi anggaran (ABT) 6. Penyesuaian/ peningkatan peralatan sesuai teknologi 7. Intensifikasi koordinasi internal dan instansi terkait
THREATS (T) :	S - T	W - T
1. Kemacetan Lalu Lintas pada jam-jam tertentu 2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas 3. Pertumbuhan jasa usaha dan perdagangan (kesemrawutan parkir) 4. Pesatnya Perkembangan kawasan Permukiman dan Perdagangan serta Angkutan umum yang berkembang 5. Pesatnya perkembangan Teknologi	1. Kembangkan dan tingkatkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan sistem transportasi yang ada serta lakukan survei LHR 2. Intensifikasi sosialisasi dan diseminasi pembinaan dan penegakan hukum 3. Meningkatkan Manajemen dan Penataan/ Pengembangan Perparkiran 4. Penataan kembali trayek yang diintegrasikan inter dan antar moda transportasi sesuai RTRW serta studi penataan dan pengembangan angkutan umum 5. Kembangkan dan tingkatkan kemampuan SDM dan teknologi	1. Optimalkan jumlah SDM, penggunaan teknologi dan pemanfaatan anggaran yang ada 2. Manfaatkan sarana dan prasarana transportasi yang ada

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Hal ini bertujuan untuk mereview kembali apakah usulan program dan kegiatan yang telah tertuang pada Rancangan Akhir renja sudah sesuai dan sinkron dengan Rancangan Akhir RKPD karena dimungkinkan dalam penyusunan Rancangan Akhir renja memungkinkan ada kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun tersebut maka kegiatan tersebut dapat diprogramkan/dimasukkan didokumen rancangan RKPD dan selanjutnya dapat menjadi kegiatan pada periode RKPD.

Setelah membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan renja, maka dijelaskan bahwa Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025 mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan perubahan nomenklatur sesuai dengan Permendagri 90/2019 sehingga terjadi perubahan di program, kegiatan dan sub kegiatan. Secara rinci review terhadap Rancangan Akhir RKPD disajikan dalam tabel T-C.31 sebagai berikut :

Pada tabel T-C.31 menggambarkan tentang indikator kinerja, target kinerja yang terukur dan pagu indikatif masing-masing sub kegiatan serta hasil analisis kebutuhan setiap program dan kegiatan.

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2027
KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)			
Dinas Perhubungan						21.719.718.000	APBD	Dinas Perhubungan						21.719.718.000	APBD	
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kota Jambi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	13.318.736.500	APBD	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kota Jambi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	13.318.736.500	APBD			
2.15.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,00	4.300.000	APBD	2.15.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,00	4.300.000	APBD			
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.300.000	APBD	2.15.01.2.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.300.000	APBD			
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	9.499.436.500	APBD	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	9.499.436.500	APBD			
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang/ Bulan	9.265.936.500	APBD	2.15.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang/ Bulan	9.265.936.500	APBD			
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	230.000.000	APBD	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	230.000.000	APBD			
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	3.500.000	APBD	2.15.01.2.02.09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	3.500.000	APBD			
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	IP ASN Perangkat Daerah	73,50	332.000.000	APBD	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	IP ASN Perangkat Daerah	73,50	332.000.000	APBD			
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	282.000.000	APBD	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	282.000.000	APBD			
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Jambi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	APBD	2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Jambi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	APBD			
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana	100%	263.000.000	APBD	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana	100%	263.000.000	APBD			
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	20.000.000	APBD	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	20.000.000	APBD			
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.000.000	APBD	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.000.000	APBD			



KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	16.000.000	APBD	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	16.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.05	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	APBD	2.15.01.2.06.05	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	100.000.000	APBD	2.15.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	100.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.000.000	APBD	2.15.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.000.000	APBD	
2.15.02.2.05.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas	12 Laporan	200.000.000	APBD	2.15.02.2.05.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas	12 Laporan	200.000.000	APBD	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan Program dan Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Jambi yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Jambi yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Jambi untuk bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Jambi Tahun 2027. Hasil Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dituangkan dalam usulan Program dan Kegiatan masyarakat tersebut diatas terhadap kesesuaian Program dan Kegiatan sebagaimana tabel T-C.32 sebagai berikut :

TABEL T-C. 32
 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

No	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Jambi	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Kota Jambi	Cakupan Jalan yang Berkeselamatan		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	Danau Sipin	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	1	Pemasangan Rambu-rambu di Danau Sipin
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	OKP	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	1	Pemasangan Median Jalan di OKP
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	Talang Jauh	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	1	Pemasangan Median Jalan di lokasi depan Kantor Lurah Talang Jauh
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	Kota Baru	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	1	Pemasangan Median Jalan di lokasi tugu keris
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	Kota Jambi	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	1	Pemasangan marka/ median jalan di ruas jalan yang lebar 4m-5m
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	Kota Jambi	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	1	Memperbanyak jalur sepeda untuk penilaian adipura
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Jambi	Persentase Penataan Perparkiran		
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Jambi	Persentase Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1	Pengaturan Titik Parkir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi merupakan bagian dari system pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota Jambi. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Jambi sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik nasional tingkat Provinsi maupun tingkat kab/kota.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
- 2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;
- 3) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- 4) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
- 6) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance;
- 7) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
- 8) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
- 9) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*;

- 10) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi multimoda dan antarmoda;
- 11) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
- 12) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya;
- 13) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
- 14) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi tahun perencanaan 2027 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi 2025-2029.

Selanjutnya hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan tabel sebagai berikut :

TABEL 3.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
1	2	3
1.	Rasio Konektivitas	0,33
2.	V/C Rasio	0,54

3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam merumuskan program dan kegiatan untuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2026, sejumlah faktor yang relevan perlu dipertimbangkan agar program yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan



Perhubungan di Kota Jambi secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa faktor yang harus menjadi bahan pertimbangan :

- Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi : Program dan kegiatan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan konsistensi dalam arah pembangunan kota
- Kebijakan Nasional dan Daerah : Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti kebijakan transportasi nasional, peraturan perhubungan darat, serta program pengembangan infrastruktur yang relevan, harus diperhatikan. Program dan kegiatan di Renja Dinas Perhubungan harus selaras dengan kebijakan tersebut untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan sinergi antara kebijakan yang lebih luas dan kebutuhan lokal.
- Kebutuhan Infrastruktur Transportasi : Perlu dilakukan identifikasi mendalam mengenai infrastruktur transportasi yang ada saat ini, seperti jalan raya, terminal, jembatan, transportasi publik (angkutan kota), dan fasilitas pendukung lainnya. Identifikasi ini akan mempermudah penentuan prioritas program dan kegiatan yang perlu diperbaiki atau dibangun, baik dalam hal perawatan maupun pembangunan baru.
- Masalah Transportasi yang Dihadapi : Identifikasi permasalahan transportasi yang dihadapi di Kota Jambi sangat penting, misalnya kemacetan, ketidakmerataan distribusi layanan transportasi publik, keselamatan jalan, kualitas jalan yang buruk, atau kesulitan dalam mobilitas bagi penyandang disabilitas. Solusi yang diusulkan dalam program dan kegiatan Renja harus berbasis pada penanganan masalah-masalah ini secara konkret.
- Sumber Daya Keuangan : Perencanaan program dan kegiatan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dari APBD Kota Jambi serta kemungkinan dukungan dari sumber daya lain seperti hibah atau bantuan pemerintah pusat. Pembiayaan yang terbatas harus dipertimbangkan dalam merumuskan prioritas dan skala program yang realistis.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) : Kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Dinas Perhubungan Kota Jambi perlu diperhatikan dalam merumuskan program dan kegiatan. Pelatihan atau peningkatan kapasitas staf bisa menjadi

salah satu kegiatan dalam Renja untuk memastikan SDM siap dalam mendukung implementasi program.

- Teknologi dan Inovasi : Penggunaan teknologi terkini dalam pengelolaan transportasi dan perhubungan, seperti sistem manajemen lalu lintas berbasis IT, transportasi berbasis aplikasi (ride-sharing), serta inovasi dalam sistem tiket dan pembayaran, harus dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam layanan transportasi.
- Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders : Keterlibatan masyarakat, komunitas pengguna transportasi, serta pemangku kepentingan lain seperti sektor swasta (misalnya perusahaan transportasi) perlu diperhatikan. Dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan evaluasi, Dinas Perhubungan dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas program.
- Evaluasi Program Sebelumnya : Evaluasi terhadap program-program yang sudah dilaksanakan sebelumnya sangat penting untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau keberhasilan yang bisa diterapkan dalam program tahun 2026. Evaluasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang harus diperbaiki atau diteruskan.
- Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Transportasi : Berdasarkan analisis kebutuhan dan masalah yang ada, pemilihan prioritas infrastruktur dan layanan transportasi yang harus dibangun atau diperbaiki menjadi faktor penting. Apakah itu pengembangan sistem transportasi umum, pengembangan infrastruktur jalan, perbaikan terminal, atau sistem parkir yang lebih efisien.
- Demografi dan Pertumbuhan Penduduk : Dinamika pertumbuhan penduduk dan mobilitas masyarakat akan memengaruhi perencanaan transportasi. Perkembangan kawasan-kawasan pemukiman baru atau pusat-pusat bisnis yang berkembang perlu diantisipasi dengan menambah kapasitas atau merancang ulang jalur transportasi yang ada.
- Potensi Risiko dan Tantangan : Identifikasi risiko yang dapat muncul selama pelaksanaan program, seperti risiko bencana alam, gangguan sosial, atau kendala teknis, perlu diperhitungkan. Penyusunan langkah mitigasi terhadap

risiko ini menjadi bagian penting dalam merumuskan program yang siap dihadapi tantangannya.

- Waktu dan Target Pencapaian : Program dan kegiatan yang direncanakan harus realistis dalam hal waktu pelaksanaan dan target pencapaian. Pengaturan jadwal yang tepat untuk setiap tahapan pelaksanaan program akan mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya yang ada.
- Dampak Ekonomi : Mengukur dampak ekonomi dari program perhubungan sangat penting. Program transportasi yang efisien dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing kota dalam menarik investor atau wisatawan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, rumusan program dan kegiatan untuk Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2027 dapat lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2028
KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PERHUBUNGAN			21.719.718.000				22.069.766.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	B	13.318.736.500	APBD		B	13.617.100.000	APBD
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kota Jambi	69,00	4.300.000	APBD		69,30	4.500.000	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	10 Dokumen	4.300.000	APBD		10 Dokumen	4.500.000	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat	Kota Jambi	100%	9.499.436.500	APBD		100%	10.233.600.000	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	272 Orang/ Bulan	9.265.936.500	APBD		272 Orang/ Bulan	10.000.000.000	APBD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	100 Dokumen	230.000.000	APBD		100 Dokumen	230.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kota Jambi	1 Laporan	3.500.000	APBD		1 Laporan	3.600.000	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kota Jambi	73,50	332.000.000	APBD		74,00	312.000.000	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	3 Paket	282.000.000	APBD		3 Paket	282.000.000	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Jambi	10 Orang	50.000.000	APBD		6Orang	30.000.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Kantor	Kota Jambi	100%	263.000.000	APBD		100%	407.000.000	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	25.000.000	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	72.000.000	APBD		1 Paket	80.000.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Jambi	4 Paket	16.000.000	APBD		4 Paket	17.000.000	APBD
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Jambi	12 Laporan	10.000.000	APBD		12 Laporan	10.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kota Jambi	12 Laporan	100.000.000	APBD		12 Laporan	200.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	3 Paket	45.000.000	APBD		3 Paket	75.000.000	APBD

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Jambi	100%	1.900.000.000	APBD		100%	1.325.000.000	APBD
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Jambi			APBD		7 Unit	1.125.000.000	APBD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Jambi	1 Unit	1.800.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Jambi	24 Unit	100.000.000	APBD		24 Unit	100.000.000	APBD
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	100%	590.000.000	APBD		100%	605.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	12 Laporan	10.000.000	APBD		12 Laporan	-	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Jambi	12 Laporan	580.000.000	APBD		12 Laporan	600.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Jambi			APBD		12 Laporan	5.000.000	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	Kota Jambi	100%	730.000.000	APBD		100%	730.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Jambi	65 Unit	500.000.000	APBD		65 Unit	500.000.000	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Jambi	10 Unit	130.000.000	APBD		10 Unit	130.000.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Jambi	5 Unit	100.000.000	APBD		5 Unit	100.000.000	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi ideal	Kota Jambi	56%	8.160.981.500	APBD		76%	8.372.666.000	APBD
	Outcome 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat	Kota Jambi	21		APBD		32		APBD
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	Kota Jambi	56%	615.000.000	APBD		76%	615.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Jambi	30 Unit	150.000.000	APBD		35 Unit	150.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Jambi	910 Unit	465.000.000	APBD		910 Unit	465.000.000	APBD

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Indeks Kepuasan Layanan Terminal	Kota Jambi	70%	408.000.000	APBD		75%	1.028.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Operasional Tipe C yang diawasi	Kota Jambi	2 Unit	308.000.000	APBD		2 Unit	308.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Jambi	2 Unit	100.000.000	APBD		2 Unit	100.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Jambi		-	APBD		5 Orang	20.000.000	APBD
	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Jambi			APBD		3 Unit	600.000.000	APBD
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Penataan Perparkiran	Kota Jambi	84%	633.980.000	APBD		86%	700.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Jambi	530 Dokumen	433.980.000	APBD		546 Dokumen	500.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Kota Jambi	12 Laporan	200.000.000	APBD		12 Laporan	200.000.000	APBD
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Kendaraan Layak Uji	Kota Jambi	32500 Dokumen	1.157.000.000	APBD		33000 Dokumen	567.664.500	APBD
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Jambi	2 Orang	50.000.000	APBD				APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan	Kota Jambi	32500 Dokumen	420.000.000	APBD		33000 Dokumen	420.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	Kota Jambi	2 Unit	137.000.000	APBD		2 Unit	147.664.500	APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Jambi	2 Unit	550.000.000	APBD				APBD
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan	Kota Jambi	45,50%	125.000.000	APBD		65,50%	235.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Jambi	20 Unit	92.000.000	APBD		25 Unit	92.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	4 Laporan	33.000.000	APBD		4 Laporan	33.000.000	APBD
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Jambi			APBD		2 Unit	110.000.000	APBD

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan	Kota Jambi	100%	10.000.000	APBD		100%	15.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian	Kota Jambi			APBD		2 Laporan	5.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Kota Jambi	4 Laporan	10.000.000	APBD		4 Laporan	10.000.000	APBD
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kota Jambi	74%	159.000.000	APBD		83%	109.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Jambi	3 Orang	50.000.000	APBD				APBD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Jambi	40 Laporan	109.000.000	APBD		40 Laporan	109.000.000	APBD
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	Kota Jambi	0,21	5.053.001.500	APBD		0,32	5.103.001.500	APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Jambi	15 unit	5.003.001.500	APBD		20 Unit	5.003.001.500	APBD
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Jambi	12 Laporan	50.000.000	APBD		12 Laporan	100.000.000	APBD
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Persentase Kesesuaian Indikator Rencana Induk	Kota Jambi		-	APBD			-	APBD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi			APBD				APBD
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi			APBD				APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Sungai dan Danau	Kota Jambi	9 Unit	240.000.000	APBD		10 Unit	80.000.000	APBD
	Outcome 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Sungai dan Danau									
	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Jambi	60%	240.000.000	APBD		67%	80.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Kota Jambi	1 Unit	160.000.000	APBD				APBD
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan	Kota Jambi	1 Unit	80.000.000	APBD		1 Unit	80.000.000	APBD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2027 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk mendukung pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan/ subkegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan tersebut ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain :

1. Memperhatikan tugas pokok dari masing-masing bidang;
2. Memperhatikan program Pemerintah Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat;
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program/ kegiatan/ subkegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi misi baik Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kota Jambi, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Dengan rencana program dan kegiatan yang terstruktur, indikator kinerja yang jelas, serta kelompok sasaran yang tepat, Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2027 akan mendukung tercapainya sistem transportasi yang lebih efisien, aman, ramah lingkungan, dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi. Pendanaan yang optimal dan efisien akan menjadi kunci dalam merealisasikan program-program tersebut.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi tahun perencanaan 2027 ini disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinegritas dengan prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program/ kegiatan/ sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi juga sebagai dasar penyusunan APBD, namun demikian jika dalam pelaksanaan tahun berjalan terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada perubahan pagu anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2027 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan dalam rangka menyusun perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab penuh secara teknis dan administratif terhadap setiap sasaran dan target capaian indikator sasaran yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan kurun waktu 2027;
- 2) Memahami dan mengendalikan target capaian, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan;



- 3) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.

1.2 Rencana Tindak Lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kami menyadari bahwa tantangan dan peluang dalam sektor transportasi dan perhubungan terus berkembang seiring dengan dinamika kota yang semakin maju. Dengan adanya perencanaan yang matang, implementasi yang efisien, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kami yakin bahwa target-target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja ini dapat tercapai.

Berbagai program yang telah disusun bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan layanan transportasi, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan, aman, dan efisien. Melalui upaya kolaboratif, inovasi, dan komitmen yang tinggi, Dinas Perhubungan Kota Jambi berkomitmen untuk mewujudkan kota yang lebih terhubung, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Kami berharap dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder terkait, untuk bersama-sama mewujudkan Kota Jambi yang lebih maju, aman, dan nyaman.

Jambi, April 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI



Drs. AMRAN, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19691005 198908 1 002